

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAGANG GUNA
MENDAPATKAN HAK DAN KEWAJIBAN SECARA
BERIMBANG SAAT PEMAGANGAN**

SKRIPSI



OLEH :

TIARA PUTRI MAHARANI

21300090

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAGANG GUNA
MENDAPATKAN HAK DAN KEWAJIBAN SECARA
BERIMBANG SAAT PEMAGANGAN
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

TIARA PUTRI MAHARANI

21300090

SURABAYA, 15 JANUARI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Dr. ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAGANG GUNA
MENDAPATKAN HAK DAN KEWAJIBAN SECARA
BERIMBANG SAAT PEMAGANGAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

TIARA PUTRI MAHARANI

NPM : 21300090

TELAH DIPERTAHANKAN

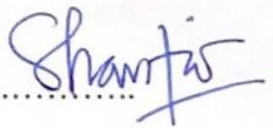
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

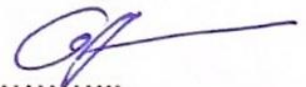
1. SHANTI WULANDARI, S.H., M.Kn.

(KETUA)

1.....

2. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2.....



3. Dr. ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.....



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Tiara Putri Maharani

NPM : 21300090

Alamat : Jl. Putat Jaya Barat 8B No.34 Kota Surabaya

No. Telp (HP) : 081336293058

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul " Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Guna Mendapatkan Hak Dan Kewajiban Saat Pemagangan " adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakutas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 21 Juni 2024

Yang menyatakan.



Tiara Putri Ma

NPM: 21300090

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAGANG GUNA MENDAPATKAN HAK DAN KEWAJIBAN SECARA BERIMBANG SAAT PEMAGANGAN" dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini saya susun sebagai pelengkap dan persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Menjelang penyelesaian penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan,

telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan penyusunan materi skripsi ini.

4. Dosen Penguji Bapak Seto Cahyono, S.H., M.Hum, Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn, Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H. selaku dosen penguji saya saat sidang skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan meluangkan waktu, pikiran serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya kedepannya.
5. Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku dosen wali yang memberi motivasi, pengalaman yang berharga kepada saya untuk tetap melanjutkan pendidikan sehingga saya telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada keluarga penulis Papa Maulana, Mama Mardiyah, dan Adik Naufal yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi tiada henti selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Kepada Moh. Muzakki Saiful Islam, Moh. Sulaiman, Mba Sisca Aldevia Azizah, Indira Aridha Istiqomah selaku saudara penulis yang selalu membantu dan memberikan arahan dalam skripsi ini.
8. Kepada Nanda Tri Novebryanti, Diva Maya Ardana, Della Oktavia Kusnandar, Nur Cholifah Syafa Illiyah selaku sahabat kampus penulis yang selalu support satu sama lain dan menemani masa- masa perkuliahan penulis dari awal hingga akhir.

9. Kepada Wandya Putri Cahyani selaku sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan semangat atas segala proses yang penulis lakukan selama perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta rekan-rekan lainnya diangkatan 2021.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekuarangan dalam penulisan skripsi ini dan penulis bersedia menerima adanya masukan serta saran dari berbagai kalangan akademisi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

PENYUSUN



TIARA PUTRI MAHARANI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Kerangka Konseptual	14
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.7 Pertanggung Jawaban.....	27
BAB II PENGATURAN PEMAGANGAN DALAM UNDANG-UNDANG	
KETENAGAKERJAAN	27
2.1 Definisi dan Manfaat Pemagangan	27
2.2 Pengaturan Pemagangan Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	33
2.3 Inkonsistensi Pengaturan Pemagangan	42
2.3.1 Munculnya Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban	42
2.3.2 Ketidaksesuaian Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)	45

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAGANG AGAR MENDAPATKAN HAK DAN KEWAJIBAN SECARA BERIMBANG.....	51
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemagang.....	51
3.2 Konsistensi Agar Pemagang Mendapatkan Hak dan Kewajiban Seimbang.....	65
3.3 Keseimbangan Hak dan Kewajiban Bagi Pemagang	67
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	72
DAFTAR BACAAN.....	70

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemagang guna mendapatkan hak dan kewajiban secara berimbang selama proses pemagangan. Konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, pengaturan mengenai pemagangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih menunjukkan permasalahan hukum berupa ketidakjelasan pengaturan terhadap status pemagang. Di latar belakang oleh ketidakseimbangan hak dan kewajiban peserta magang yang sering kali mengalami eksploitasi dalam bentuk beban kerja tinggi tanpa kompensasi memadai. Ketidakjelasan pengaturan, terutama pada Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan potensi terjadinya eksploitasi terhadap hak dan kewajiban pemagang. Masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pemagang serta potensi eksploitasi yang disebabkan oleh ketidakjelasan pengaturan dan kejelasan status pemagang.

Rumusan masalah mencakup pengaturan pemagangan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemagangan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemagang agar mendapatkan hak dan kewajiban secara berimbang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Metode Penelitian Hukum Normatif mengenai implementasi mengenai Undang-Undang pada setiap isu hukum. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih menunjukan permasalahan hukum berupa ketidakjelasan dalam hal pengaturan pemagangan, yang menjadi penyebab dalam hukum yaitu aturannya. Maka dari itu metode penelitian ini hukum normatif, karena yang menjadi masalah aturannya.

Diperlukan revisi regulasi tentang pengaturan Pemagangan di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, agar pemagang tidak hanya menjadi sarana pelatihan tetapi juga memberikan keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini mencakup penguatan peran pengawasan ketenagakerjaan dan penyelarasan hierarki peraturan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Pemagangan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This thesis discusses legal protection for apprentices in order to obtain balanced rights and obligations during the apprenticeship process. In the context of Indonesian labor law, the regulations regarding apprenticeships contained in Law Number 13 of 2003 concerning Employment still show legal problems in the form of unclear regulations regarding apprentice status. The background is an imbalance in the rights and obligations of apprentices who often experience exploitation in the form of high workloads without adequate compensation. The lack of clarity in regulations, especially in Articles 21 and 22 of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, creates the potential for exploitation of the rights and obligations of apprentices. The main problem identified is the imbalance between the rights and obligations of apprentices as well as the potential for exploitation caused by unclear regulations and clarity of apprentice status.

The problem formulation includes apprenticeship regulations in Law Number 13 of 2003 concerning Employment, as well as forms of legal protection that can guarantee a balance of rights and obligations. This research aims to determine the regulation of apprenticeships in the Employment Law and determine the form of legal protection for apprentices so that they receive balanced rights and obligations.

This research uses normative legal research methods, Normative Legal Research Methods regarding the implementation of laws on each legal issue. Law Number 13 of 2003 concerning Employment still shows legal problems in the form of lack of clarity regarding apprenticeship regulations, which is the cause of the law, namely the regulations. Therefore, this research method is normative law, because the problem is the rules.

In conclusion, it is necessary to revise the regulations regarding the regulation of apprenticeships in Law Number 13 of 2003 concerning Employment, so that apprenticeships are not only a means of training but also provide a balance of rights and obligations. This includes strengthening the role of labor inspection and aligning regulatory hierarchies to provide effective legal protection.

Keywords : *Rights and Obligations, Apprenticeship, Legal Protection*